



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sebagai realisasi dari pelaksanaan sistem otonomi daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keleluasaan dalam mengefisiensi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang merupakan potensi utama dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Salah satu implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan masing-masing regional wilayah adalah dengan meningkatkan stabilitas pembangunan melalui optimalisasi kemampuan keuangan daerah terkait pembiayaan/pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menyikapi otonomi daerah akan meningkatkan *local accountability* pemerintah terhadap masyarakat.

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (berdasarkan keadilan) di seluruh wilayah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah, dan
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik hingga ke pemerintah daerah tingkat II karena memiliki informasi yang lengkap.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang didasari dengan asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Oleh karena itu, untuk memenuhi dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah diperlukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan produk unggulan Provinsi Kalimantan Tengah.



Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah terutama dalam penyusunan program dan kegiatan yang relevan dengan pendanaan pagu indikatif daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 yang merupakan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, perlu menekankan perihal program dan kegiatan periode sebelumnya yang memiliki kekuatan lebih dalam pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat program dan kegiatan terkait arah kebijakan yang disusun harus memiliki keterkaitan dengan perencanaan tahun sebelumnya terutama yang terkait pendanaan. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan tahun 2016 akan menjadi acuan dasar dalam melanjutkan kinerja pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah pada tahap selanjutnya.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stakeholder* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (pembangunan nasional).

Analisis ekonomi makro daerah akan menjadi penunjang dalam mengkaji dan mengevaluasi kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar dalam memproyeksikan kondisi perekonomian tahun 2017 untuk memberikan gambaran awal pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait perekonomian mikro



yang merupakan *basic* dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2017 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang diambil haruslah melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah termasuk dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan asumsi perencanaan pembangunan daerah.

3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

Salah satu kajian utama dalam melihat fenomena perekonomian daerah adalah analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun analisis stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok melalui indikator laju inflasi.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis PDRB harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB maupun indikator turunannya seperti laju pertumbuhan ekonomi maupun struktur perekonomian wilayah. Sedangkan perekonomian mikro dapat diindikasikan melalui kestabilan harga kebutuhan hidup masyarakat di setiap bulannya.

a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda ekonomi wilayah berputar meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam

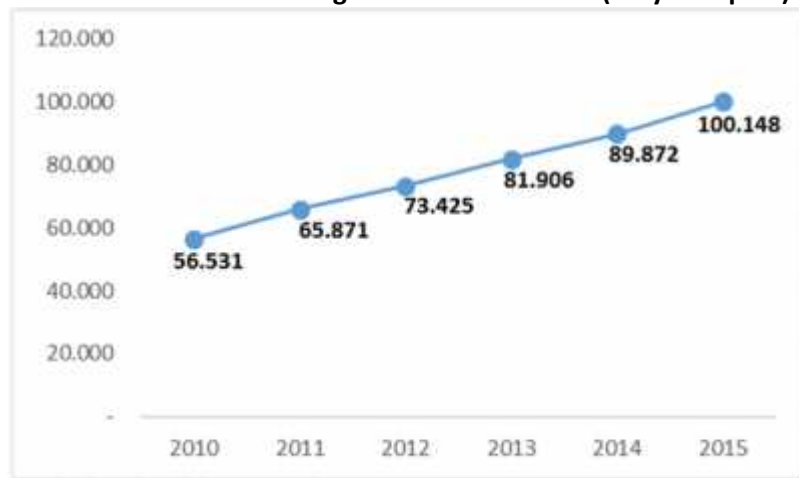


menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Secara definitif, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun secara konsisten dimana pada tahun 2014, angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai 89.871,73 miliar rupiah dan tahun 2015 mencapai 100.148 miliar rupiah.

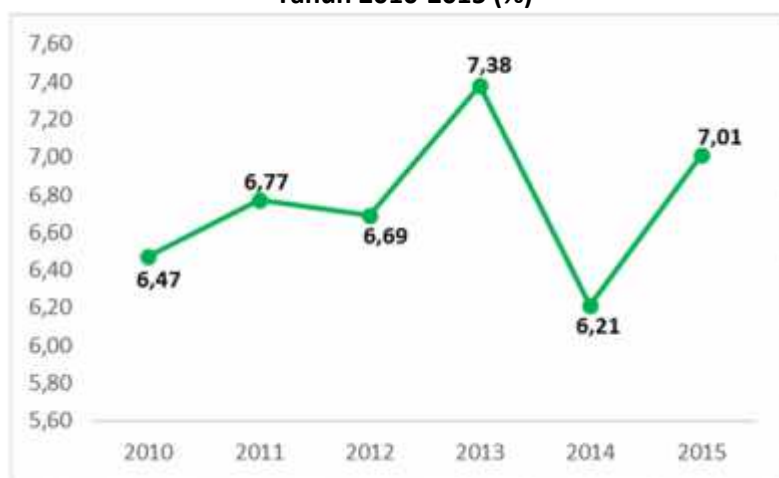
Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil di antara kisaran 6 persen hingga 7 persen. Pada tahun 2014, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh 6,21 persen dimana mengalami perlambatan perekonomian jika dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,38 persen. Pada tahun 2015 perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh 7,01 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,21 persen

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013-2014 (%)

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,46	6,71	5,32
2	Pertambangan dan Penggalian	15,97	-2,87	2,04
3	Industri Pengolahan	7,89	12,16	6,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,06	16,07	25,54
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,40	4,47	3,32
6	Konstruksi	3,08	9,92	9,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,29	7,68	8,29
8	Transportasi dan Pergudangan	11,52	2,14	13,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,00	8,21	8,28
10	Informasi dan Komunikasi	9,90	12,08	5,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	6,66	2,16
12	Real estate	6,99	7,11	8,56
13	Jasa Perusahaan	7,76	4,54	7,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,00	8,86	15,34
15	Jasa Pendidikan	4,55	9,67	10,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,77	8,86	9,73
17	Jasa Lainnya	4,98	8,86	7,56
Provinsi Kalimantan Tengah		7,38	6,21	7,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

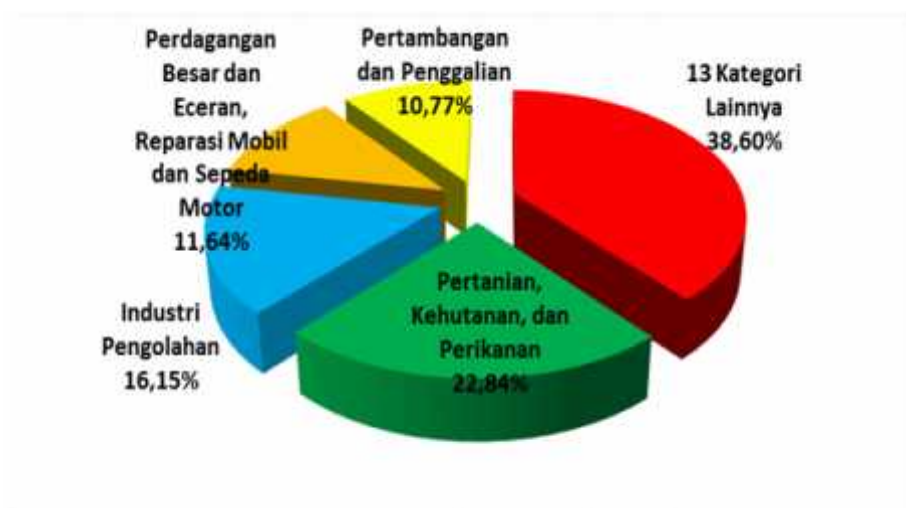
Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 25,54 persen, diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,34 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,57 persen.

Pada sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 15,97 persen terjadi penurunan cukup besar yang mana pada tahun 2014 terdapat pertumbuhan negatif sebesar 2,87 persen dan pada tahun 2015 tumbuh positif sebesar 2,04 hal ini salah satunya disebabkan karena adanya pemberlakuan Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai berlaku 12 Januari 2014, dengan tujuan untuk menaikkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Undang-undang ini, pengusaha dilarang mengekspor enam jenis bahan mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batu bara sebelum diolah.

Jika dilihat dari “kue” perekonomian wilayah, struktur perekonomian Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,84 persen); Industri Pengolahan (16,15 persen), Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,64 persen) dan Pertambangan dan Penggalian (10,77 persen).

Selain itu, terdapat juga kontribusi yang cukup besar pada sektor-sektor lain seperti perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor), konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Gambar 3.3
Struktur Perekonomian
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

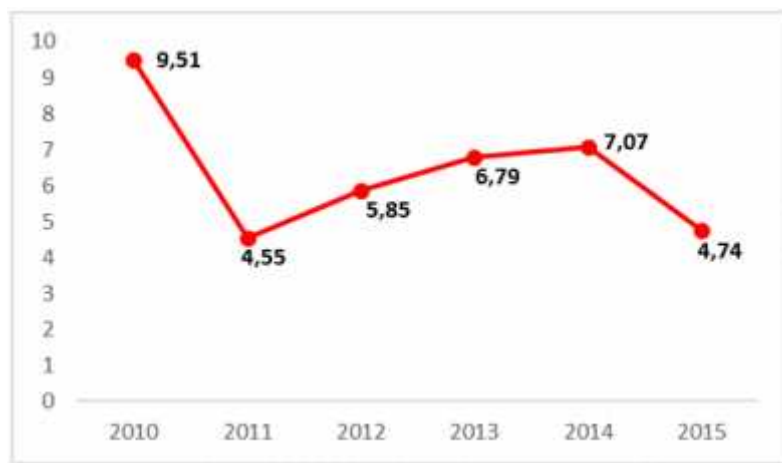


b. Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara *series* dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menuju suatu kestabilan harga dimana laju inflasi berada pada tingkatan normal di kisaran ± 6 persen. Laju inflasi pada tahun 2015 mencapai 4,74 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 7,07 persen, maupun tahun 2013 yang mencapai 6,79 persen. Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Gambar 3.4
Laju Inflasi Tahunan
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016



Tabel 3.2
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2015 (%)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi Tahunan Palangka Raya	11,65	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20
Inflasi Tahunan Sampit	8,89	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72
Inflasi Kalimantan Tengah	10,44	2,02	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74
Inflasi Nasional	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

Stabilnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 4,20 persen (yoy) dan Sampit sebesar 5,72 persen (yoy) pada Desember 2015. Kedua wilayah tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi. Jika dilihat dari data *seriesnya*, maka inflasi kedua kota tersebut tidak bisa dibandingkan dan diprediksi karena tingkat fluktuatif yang cukup signifikan dan keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri sesuai pembentukan kondisi pasar di masyarakat.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan tahun 2017

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan melalui perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah selama beberapa periode serta melihat laju pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral. Target dan capaian Indikator makro pembangunan daerah tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:



Tabel 3.3
Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

Indikator	2011		2012		2013		2014		2015	
	Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertumbuhan PDRB (%)	6,7	6,74	6,9	6,69	7,1	7,37	7,3	6,21	7,5	7,01
Laju Inflasi Prov (%)	6	4,55	5,0	5,85	4,0	6,79	3,0	7,07	2,5	4,74
PDRB Per kapita (Juta Rp.)	18,5	29	21,0	31,52	24	34,4	27,5	36,83	31,0	40,1
Angka Kemiskinan (%)	4,5	6,64	3,5	6,19	3,0	6,23	2,5	6,07	2,0	5,91
Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,5	2,55	3,0	3,17	2,75	3,09	2,5	3,24	2	4,54

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Pada tahun 2015 dan 2016, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh eksternal berupa perkembangan ekonomi nasional dan global. Beberapa tantangan tersebut antara lain menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi, serta perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan I-2016 diproyeksi tumbuh sebesar 7,2 persen (ctc). Rencana pembangunan beberapa infrastruktur terkait pengalihan subsidi BBM dan trend membaiknya perekonomian global akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dipengaruhi oleh masih rendahnya pengeluaran rumah tangga dan pemerintah di awal tahun serta investasi swasta yang cenderung rendah karena baru memasuki tahap perencanaan. Dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 sesuai perumusan dalam dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan prospek ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dapat mencapai target-target yang telah ditentukan.

Indikator ekonomi lainnya yang penting bagi perkembangan ekonomi daerah adalah laju inflasi. Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai inflasi dihitung dari pembentukan inflasi dua kota yaitu Palangka Raya dan Sampit. Perhitungan nilai inflasi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan gabungan dari dua kota tersebut yang diasumsikan dapat menggambarkan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah secara umum. Adapun perkembangan inflasi selama tahun 2008-2015 dan target tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2015 (%)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *)
Inflasi Tahunan Palangka Raya	11,65	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20	3,69
Inflasi Tahunan Sampit	8,89	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72	4,43
Inflasi Kalimantan Tengah	10,44	2,02	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74	3,95
Inflasi Nasional	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

*) inflasi bulan April-2016 (year of year)

Dalam upaya mengendalikan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tugas pokok TPID antara lain melakukan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi daerah. Anggota TPID adalah seluruh dinas/instansi/ lembaga terkait proses pembentukan inflasi sehingga masing-masing permasalahan pada kenaikan harga dapat ditekan melalui berbagai penanganan sektoral.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjaga ekspektasi harga di masyarakat, antara lain dalam bentuk himbuan dan informasi harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui media massa secara intens hingga inisiatif untuk mengadakan pasar penyeimbang yang beroperasi menjelang dan setelah hari Raya Idul Fitri maupun natal dan tahun baru, yang berfungsi sebagai penyeimbang harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.

Lokasi pasar penyeimbang yang berdekatan dengan salah satu pasar tradisional terbesar di kota Palangka Raya tersebut sangat diminati oleh masyarakat karena harga yang dijual lebih murah 10-20 persen jika dibandingkan harga di pasar tradisional. Adapun komoditas yang diperdagangkan adalah beberapa jenis komoditas yang sering memicu inflasi, antara lain beras, minyak goreng, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir, ikan gabus, daging ayam ras, telur ayam ras, ketimun, minyak tanah dan susu.

Dengan kondisi infrastruktur yang semakin membaik, produksi pangan dan sistem distribusi yang relatif stabil serta didukung dengan keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan rencana aksi yang jelas, maka diperkirakan laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dan 2017 dapat ditekan menjadi sekitar 3,5-4,5 persen.

Jika dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari angka kemiskinan, kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Analisis kesejahteraan melalui profil kemiskinan memberi gambaran bahwa terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan yang terkait erat dengan adanya upaya



pembangunan ekonomi daerah yang terus dilakukan. Meski perlahan, namun pembangunan yang terjadi dapat dikatakan cukup berkualitas. Faktanya terlihat dari *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan dimana persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,54 persen setiap tahunnya. Adapun persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 6,07 persen dan tahun 2015 sebesar 5,91 persen, menurun tajam jika dibanding tahun 2003 dimana hampir mencapai 12 persen penduduk berada pada kategori miskin (memiliki tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan).

3.1.3. Prospek Ekonomi Daerah

Prospek Ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 pada Triwulan II diperkirakan akan membaik dan diperkirakan berada dalam rentang 6,4% - 6,9% (yoy). Peningkatan produksi komoditas tabama dan perkebunan pada triwulan II 2016 diperkirakan akan mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pertanian. Peningkatan sektor perdagangan juga diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan mendatang seiring peningkatan konsumsi masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan. Dari sisi permintaan diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh komponen konsumsi RT dan konsumsi pemerintah.

Sisi Permintaan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi permintaan didorong sisi konsumsi rumah tangga pada triwulan mendatang diperkirakan akan mendorong peningkatan seiring tingginya konsumsi masyarakat pada saat bulan suci Ramadhan. Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami peningkatan. Tingkat serapan belanja daerah pada triwulan I 2016 akan mendorong peningkatan serapan belanja daerah pada triwulan berikutnya. Dengan adanya pelantikan Gubernur definitif juga akan mendorong penyerapan belanja daerah.

Sisi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi sektoral, didorong oleh sektor pertanian diperkirakan akan membaik pada triwulan II 2016. Produksi padi pada triwulan II tahun 2016 diperkirakan akan meningkat didorong oleh bertambahnya luas areal sawah seiring pelaksanaan program Upaya Khusus. Di sisi lain, perbaikan NTP juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Sementara itu diperkirakan subsektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit akan tumbuh positif didorong oleh meningkatnya luas lahan produktif dan perkiraan perbaikan harga TBS. Sedangkan sektor Industri pengolahan diperkirakan akan meningkat, peningkatan produksi TBS seiring meningkatnya jumlah areal luas tanaman produktif di tahun 2016, di sisi lain berdasarkan data BMKG, curah hujan pada triwulan II 2016 diperkirakan masih cukup tinggi sehingga mendorong peningkatan produksi TBS.



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolok ukur dalam evaluasi penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dimana kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya menjadi gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung dengan mengukur kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Perkiraan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

Pendapatan daerah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.3.715.000.000.000,00 turun sebesar Rp.520.177.751.130,00 atau -12,28 persen jika dibandingkan dengan target pada APBD murni Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp.4.235.177.751.130,00. Komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp.1.318.531.951.435,00, turun sebesar Rp.379.535.148.495,00 atau -22,35% dibandingkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.698.067.099.930,00

b. Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 2.395.443.248.565,00 turun Rp.135.682.687.435,00 atau -5,35% dibandingkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.536.125.936.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD Tahun Anggaran 2016, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 984.715.200,00. Sedangkan untuk tahun 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.1.024.800.000,00.

Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.5.



Tabel 3.5
Perkiraan Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan
Rancangan Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun 2017
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Target Tahun 2016 (Rp)	Target Tahun 2017 (Rp)	Tambah/(Berkurang) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.698.067.099.930,00	1.318.531.951.435,00	(379.535.148.495,00)	(22,35)
1.1.1	Pajak Daerah	1.343.651.767.630,00	1.087.818.351.435,00	(255.833.416.195,00)	(19,04)
1.1.2	Retribusi Daerah	9.959.107.300,00	9.934.500.000,00	(24.607.300,00)	(0,25)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	40.900.000.000,00	45.204.000.000,00	4.304.000.000,00	4,41
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	303.556.225.000,00	175.575.100.000,00	(130.581.125.000,00)	(43,02)
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.536.125.936.000,00	2.395.443.248.565,00	(7.342.166.000,00)	(0,29)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.073.020.216.000,00	1.937.337.528.565,00	(2.342.166.000,00)	(0,11)
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	199.081.760.000,00	182.799.835.565,00	17.317.240.000,00	8,70
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	306.730.763.000,00	187.330.000.000,00	(19.659.406.000,00)	(6,41)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.294.850.243.000,00	1.294.850.243.000,00	-	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	272.357.450.000,00	272.357.450.000,00	-	-
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	459.675.720.000,00	454.675.720.000,00	(5.000.000.000,00)	(1,09)
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Penyesuaian	459.675.720.000,00	454.675.720.000,00	(5.000.000.000,00)	(1,09)
1.2.4	Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	-	-
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	3.185.000.000,00	3.185.000.000,00	-	-
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Kota	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	984.715.200,00	1.024.800.000,00	40.084.800,00	4,07
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	984.715.200,00	1.024.800.000,00	40.084.800,00	4,07
JUMLAH PENDAPATAN		4.235.177.751.130,00	3.715.000.000.000,00	(334.196.351.130,00)	(7,89)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng, 2016



Adapun hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan dalam tabel 3.6.



Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 - 2017

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp)			Proyeksi/Target (Rp)	
		Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2014	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.093.821.486.342,18	1.253.716.040.134,09	1.175.434.293.729,62	1.698.067.099.930,00	1.371.172.830.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	973.244.830.304,00	1.087.630.497.573,00	1.019.146.895.225,00	1.343.651.767.630,00	1.087.818.351.435,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.371.574.609,00	9.065.198.572,00	9.859.826.058,00	9.959.107.300,00	9.934.500.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.298.651.979,25	29.775.553.518,68	37.075.679.486,26	40.900.000.000,00	45.204.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	87.906.429.449,93	127.244.790.470,41	109.351.892.930,36	303.556.225.000,00	175.575.100.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	-	-	-	2.536.125.936.000,00	2.395.443.248.565,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	2.073.020.216.000,00	1.937.337.528.565,00
1.2.1.1	Bagi hasil pajak	-	-	-	199.081.760.000,00	182.799.835.565,00
1.2.1.2	Bagi hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	306.730.763.000,00	187.330.000.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	1.294.850.243.000,00	1.294.850.243.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	272.357.450.000,00	272.357.450.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	-	-	-	459.675.720.000,00	454.675.720.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	459.675.720.000,00	454.675.720.000,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	-	-	-	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari	-	-	-	-	-



No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp)			Proyeksi/Target (Rp)	
		Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2014	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemerintah Daerah Provinsi lainnya					
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	-	-	-	3.185.000.000,00	3.185.000.000,00
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Kota	-	-	-	245.000.000,00	245.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.442.477.673.796,00	1.557.416.499.094,00	1.673.376.642.956,00	-	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	316.661.423.796,00	343.057.931.094,00	117.308.742.600,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Umum	1.062.516.940.000,00	1.152.428.738.000,00	1.280.595.804.000,00	-	-
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	63.299.310.000,00	61.929.830.000,00	72.525.960.000,00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	272.796.978.722,99	318.563.275.960,67	406.882.942.774,25	984.715.200,00	1.024.800.000,00
1.3.1	Hibah	6.738.335.042,00	8.518.902.456,00	10.303.355.500,00	-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	248.391.255.000,00	288.338.823.210,00	371.403.365.546,00	-	-
1.3.4	Dana Insentif Khusus	-	245.077.800.000,00		-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.060.349.724,00	13.218.705.500,00	15.637.000.000,00	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	9.607.038.956,99	8.486.844.794,67	9.539.221.728,25	984.715.200,00	1.024.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.809.096.138.861,17	3.129.695.815.188,76	3.255.693.879.459,87	4.235.177.751.130,00	3.715.000.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng 2016



3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.3.715.000.000.000,00 dan jika dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.224.575.251.130,00 turun sebesar Rp. 509.575.251.130,00 atau -12,06 persen. Anggaran belanja daerah tahun 2017 Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL), dianggarkan sebesar Rp.1.878.602.038.000,00. dan jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.957.338.274.129,00 mengalami penurunan sebesar Rp.78.736.236.129,00 atau -4,02 persen. Sedangkan komposisi alokasi BTL Tahun Anggaran 2017 terhadap total belanja daerah adalah 50,57 persen.
- b. Belanja Langsung (BL) tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.1.836.397.962.000,00 dan jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.267.236.977.001,00 turun sebesar Rp.430.839.015.001,00 atau turun sebesar -19,00 persen. Sedangkan komposisi alokasi BL Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 49,43 persen terhadap total belanja daerah.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta biaya pemungutan pajak daerah. Belanja Pegawai pada TA. 2017 dianggarkan sebesar Rp.717.342.700.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.125.510.128.685,00 atau 21,21% jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.591.832.571.315,00

2) Belanja Bunga

Sama seperti pada tahun 2016, untuk komponen Belanja Bunga pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pinjaman daerah.

**3) Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.1.163.300.000,00 sama dengan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.503.223.600.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp.31.732.985.500,00 atau turun -5,93% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.534.956.586.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.16.572.437.500,00 mengalami penurunan Rp.47.936.562.500,00 atau -74,31% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.64.509.000.000,00.

6) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), serta Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.624.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp.129.738.016.814,00 atau -17,21 persen dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 753.738.016.814,00.

7) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.5.300.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.600.000.000,00 atau 12,77% dibandingkan dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.700.000.000,00.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pada tahun 2017, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.11.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp.4.561.200.000,00 atau 70,84 persen dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.438.800.000,00



Hasil analisis, perkiraan, realisasi, serta proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.



Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2013-2016

No.	Uraian	Realisasi			Target/Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	BELANJA DAERAH					
2. 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.362.464.010.033,04	1.520.005.101.032,00	1.649.116.749.492,00	1.957.338.274.129,00	1.878.602.038.000,00
2. 1. 1.	Belanja Pegawai	347.181.664.871,92	413.478.671.673,00	434.769.089.833,00	591.832.571.315,00	717.342.700.000,00
2. 1. 2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2. 1. 3.	Belanja Subsidi	13.579.962.500,00	21.079.630.000,00	1.779.017.500,00	1.163.300.000,00	1.163.300.000,00
2. 1. 4.	Belanja Hibah	289.208.314.651,00	294.508.620.000,00	604.198.435.716,00	534.956.586.000,00	503.223.600.500,00
2. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	59.463.822.656,00	68.776.445.000,00	67.090.690.551,00	64.509.000.000,00	16.572.437.500,00
2. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	485.973.439.670,12	561.334.380.000,00	372.558.291.855,00	753.738.016.814,00	624.000.000.000,00
2. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	165.904.127.529,00	159.162.886.932,00	165.953.964.087,00	4.700.000.000,00	5.300.000.000,00
2. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	1.152.678.155,00	1.664.467.427,00	2.767.259.950,00	6.438.800.000,00	11.000.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	1.362.464.010.033,04	1.520.005.101.032,00	1.649.116.749.492,00	1.957.338.274.129,00	1.878.602.038.000,00
2. 2.	BELANJA LANGSUNG	1.517.050.224.813,49	1.698.901.958.968,00	1.833.228.517.456,00	2.267.236.977.001,00	1.836.397.962.000,00
2. 2. 1.	Belanja Pegawai	67.013.949.449,00	74.592.567.680,00	139.036.429.017,00	164.048.005.130,00	
2. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	509.795.274.708,49	876.107.665.534,00	735.050.544.979,00	909.060.531.519,00	
2. 2. 3.	Belanja Modal	940.241.000.656,00	748.201.725.754,00	959.141.543.370,00	1.194.128.440.352,00	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.517.050.224.813,49	1.698.901.958.968,00	1.833.228.517.456,00	1.915.519.942.685,00	1.836.397.962.000,00
D	JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)	2.879.514.234.846,53	3.218.907.060.000,00	3.482.345.266.948,00	4.224.575.251.130,00	3.715.000.000.000,00



Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2016.



3.2.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 turun sebesar Rp.111.000.000.000,00 atau 81,62% jika dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.136.000.000.000,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). Untuk komponen lainnya dari penerimaan pembiayaan yang meliputi pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang pada tahun 2017 tidak dianggarkan.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.121.602.500.000,00 atau -82,95% dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.146.602.500.000. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 ini bersumber dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan yang meliputi pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok hutang, serta pemberian pinjaman tidak dianggarkan pada tahun 2017.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada **tabel 3.8**. Sedangkan perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2013 s.d. 2017 terlihat pada **tabel 3.9** Kemudian pada realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, dirangkum dalam tabel realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2017, sebagaimana terlihat pada **tabel 3.10**.



Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2017

No.	Uraian	Realisasi			Target/Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02		136.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3. 1. 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	559.289.889.435,44	386.704.833.374,02		136.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-	-
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	-
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3.1.1 s/d 3.1.6)		559.289.889.435,44	386.704.833.374,02		136.000.000.000,00	25.000.000.000,00

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2016



Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)			
3.	2.		Pengeluaran Pembiayaan	53.000.000.000,00	100.500.000.000,00		146.602.500.000,00	25.000.000.000,00
3.	2.	1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00		-	-
3.	2.	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	38.000.000.000,00	85.500.000.000,00		85.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.	2.	3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		61.602.500.000,00	-
3.	2.	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (3.2.1 s/d 3.2.4)				53.000.000.000,00	100.500.000.000,00		146.602.500.000,00	25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto				506.289.889.435,44	286.204.833.374,02		(10.602.500.000,00)	0,00

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng, 2016



Tabel 3.10
Kerangka Pendanaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Uraian	APBD TA. 2016	Kerangka Pendanaan Tahun 2017	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.698.067.099.930,00	1.318.531.951.435,00	(379.535.148.495,00)	(22,35)
1.1.1	Pajak Daerah	1.343.651.767.630,00	1.087.818.351.435,00	(255.833.416.195,00)	(19,04)
1.1.2	Retribusi Daerah	9.959.107.300,00	9.934.500.000,00	(24.607.300,00)	(0,25)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	40.900.000.000,00	45.204.000.000,00	4.304.000.000,00	10,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	303.556.225.000,00	175.575.100.000,00	(127.981.125.000,00)	(42,16)
1.2	Pendapatan Transfer	2.536.125.936.000,00	2.395.443.248.565,00	(135.682.687.435,00)	(5,35)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.073.020.216.000,00	1.937.337.528.565,00	(135.682.687.435,00)	(6,55)
1.2.1.1	Bagi hasil pajak	199.081.760.000,00	182.799.835.565,00	(16.281.924.435,00)	(8,18)
1.2.1.2	Bagi hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	306.730.763.000,00	187.330.000.000,00	(119.400.763.000,00)	(38,93)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.294.850.243.000,00	1.294.850.243.000,00	-	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	272.357.450.000,00	272.357.450.000,00	-	-
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	459.675.720.000,00	454.675.720.000,00	(5.000.000.000,00)	(1,09)
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Penyesuaian	459.675.720.000,00	454.675.720.000,00	(5.000.000.000,00)	(1,09)



No.	Uraian	APBD TA. 2016	Kerangka Pendanaan Tahun 2017	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.4	Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	-	-
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	-	-	-	-
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	3.185.000.000,00	3.185.000.000,00	-	-
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Kota	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	984.715.200,00	1.024.800.000,00	40.084.800,00	4,07
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	984.715.200,00	1.024.800.000,00	40.084.800,00	4,07
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 s/d 1.3)	4.235.177.751.130,00	3.715.000.000.000,00	(520.177.751.130,00)	(12,28)
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.957.338.274.129,00	1.878.602.038.000,00	(78.736.236.129,00)	(4,02)
2.1.1	Belanja Pegawai	591.832.571.315,00	717.342.700.000,00	125.510.128.685,00	21,21
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	1.163.300.000,00	1.163.300.000,00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	534.956.586.000,00	503.223.600.500,00	(31.732.985.500,00)	(5,93)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	64.509.000.000,00	16.572.437.500,00	(47.936.562.500,00)	(74,31)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	753.738.016.814,00	624.000.000.000,00	(129.738.016.814,00)	(17,21)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.700.000.000,00	5.300.000.000,00	600.000.000,00	12,77
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.438.800.000,00	11.000.000.000,00	4.561.200.000,00	70,84
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	1.957.338.274.129,00	1.878.602.038.000,00	(78.736.236.129,00)	(4,02)



No.	Uraian	APBD TA. 2016	Kerangka Pendanaan Tahun 2017	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.267.236.977.001,00	1.836.397.962.000,00	(430.839.015.001,00)	(19,00)
2.2.1	Belanja Pegawai	164.048.005.130,00			-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	909.060.531.519,00			-
2.2.3	Belanja Modal	1.194.128.440.352,00			-
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN	2.267.236.977.001,00	1.836.397.962.000,00	(430.839.015.001,00)	(19,00)
	JUMLAH TOTAL BELANJA (B+C)	4.224.575.251.130,00	3.715.000.000.000,00	(509.575.251.130,00)	(12,06)
	Surplus/Defisit (A - D)	10.602.500.000,00	0,00	(10.602.500.000,00)	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	136.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(111.000.000.000,00)	(81,62)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	136.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(111.000.000.000,00)	(81,62)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)	136.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(111.000.000.000,00)	(81,62)



No.	Uraian	APBD TA. 2016	Kerangka Pendanaan Tahun 2017	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	146.602.500.000,00	25.000.000.000,00	(121.602.500.000,00)	(82,95)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	85.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(60.000.000.000,00)	(70,59)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	61.602.500.000,00	-	(61.602.500.000,00)	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)	146.602.500.000,00	25.000.000.000,00	(121.602.500.000,00)	(82,95)
	Pembiayaan Netto (F - G)	(10.602.500.000,00)	-	10.602.500.000,00	-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H + E)	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Setda, 2016



3.2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah kebijakan pendapatan daerah

Arah kebijakan pada pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Peningkatan pelayanan publik pada Kantor Bersama Samsat; dan
- 3) Peningkatan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah. Selain itu, berbagai regulasi kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah menjadi poin penting pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. Arah kebijakan belanja daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input perencanaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah;
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang optimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk investasi di bidang pendidikan; dan
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka



melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur berdasarkan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap program prioritas harus memiliki dasar dalam penganggaran agar tidak terjadi inefisiensi pendanaan kegiatan.

C. Arah kebijakan pembiayaan daerah

Kebijakan umum terkait pembiayaan pada pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi piutang daerah dan pencairan dana cadangan. Selain itu, semaksimal mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah; dan
3. Diusahakan agar sumber pengeluaran pembiayaan daerah hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.